

STUDI TENTANG PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI KANTOR UNIT PENGELOLAAN KEGIATAN DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Yuli Tri Pujiana¹

Abstrak

Yuli Tri Pujiana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Pengelola Kegiatan bantuan kepada masyarakat dan untuk mengetahui kendala –kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan key informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah teknik pengumpulan sample dengan pertimbangan tertentu. Sample ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis dan model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa didalam pelayanan tersebut terdapat penyalahgunaan prosedur ,seperti Adanya pemungutan biaya atau pemotongan dana bantuan Program Pemberdayaan oleh pegawai Unit Pengelola Kegiatan terhadap masyarakat yang mendapat bantuan, Kurangnya kerjasama antar pihak pengelola kegiatan dengan warga dan adanya keterlambatan pencairan dana dan juga kurangnya keramahan dalam memberikan pelayanan terhadap warga yang memperoleh bantuan tersebut.

Kata Kunci : *Program Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yulitripujiana@gmail.com

Indonesia memiliki persoalan masalah kemiskinan alamiah. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih di picu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagian angkatan kerja pedesaan.

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan, Perkotaan, serta wilayah khusus dan desa tertinggal.

Rumusan Masalah

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan teluk Pandan?
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Teluk Pandan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Pandan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan teluk pandan.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan dari segi teoritis
Sebagai sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu administrasi dalam kajian Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Teluk Pandan.
2. Kegunaan dari segi praktis
Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pegawai badan pemberdayaan masyarakat mandiri dalam upaya meningkatkan kualitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Teluk Pandan.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Dalam suatu penelitian setelah merumuskan suatu masalah-masalah yang ada maka untuk langkah selanjutnya yakni mencari teori-teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk suatu pelaksanaan penelitian.

Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealu dan Prewit (dalam Nawawi, 2009:6) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh

prilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun menaatinya

Timtuss (dalam Nawawi, 2009:6) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem oriented) dan berorientasi pada tindakan (action oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Thomas R. Dye (dalam Lubis, 2007:6) kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk menentukan langkah untuk “berbuat” atau “ tidak berbuat” (to do or not to do).

Pemberdayaan

Menurut Payne dalam buku *Modern social work theory* (1997: 266) pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial.

Menurut Ife dalam buku *Community Development Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice* (1995: 182) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Sementara itu, sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Perluasan Lapangan Kerja Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan ditandai oleh kurangnya akses untuk mendapatkan barang,jasa,aset,dan peluang penting yang menjadi hak setiap orang.setiap orang harus bebas dari rasa lapar,harus dapat hidup dalam damai,dan harus mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan jasa-jasa layanan kesehatan primer.keluarga-keluarga miskin nutuh mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan cara bekerja dan mendapatkan imbalan secara wajar serta seharusnya mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan terhadap guncangan-guncangan dari luar.

Keterkaitan Antara Kemiskinan dan Pengangguran

Dari definisi kemiskinan tersebut maka mengidentikan bahwa masyarakat dikatakan miskin berarti pengangguran tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan pengangguran merupakan situasi yang disebabkan oleh faktor orang-orang yang bekerja di bawah kapasitas optimalnya (pengangguran terselubung), dan faktor orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapat lapangan pekerjaan sama sekali (pengangguran penuh). Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan melakukan distribusi pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja berupah memadai bagi kelompok-kelompok masyarakat yang miskin.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pada prinsipnya, masyarakat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Aktifitas ini kemudian menjadi basis program lokal, regional dan bahkan nasional. Target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termajinalkan dalam masyarakat. Namun demikian hal ini tidak menafikan partisipasi dari kelompok-kelompok lain.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Di Indonesia trend pembangunan partisipatif yang berdampak positif terhadap masyarakat mulai banyak digunakan pada tahun 1994, dimana banyak program atau proyek pemberdayaan masyarakat diluncurkan masing-masing sektor, seperti : IDT, PKT, P3DT, P4K, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan banyak kerancuan maupun kebingungan karena masing-masing program memiliki nama dan ukuran yang berbeda-beda.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan NO:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 maka penulis mendefinisikan Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di kantor unit pengelola kegiatan adalah memandirikan masyarakat sebagai tujuan pemberdayaan yang menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2007:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus Penelitian

Setelah penulis menguraikan konsep-konsep dari penelitian ini secara terperinci, Namun dirasa sangat penting untuk menguraikan konsep tersebut dalam bentuk yang dapat diukur. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007

1. Proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Pedesaan di Kecamatan Teluk Pandan:
 - a. Tahap Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
 - b. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
 - c. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
2. Kendala yang di hadapi dalam Proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan teluk Pandan.

Sumber Data

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan varisasi yang ada.

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu pula penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari *key informan* maupun informan melalui wawancara. Adapun *Key Informan* adalah Fasilitator Kecamatan (FK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dan Ketua unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Untuk *Informan* sendiri adalah Masyarakat yang mendapat Program Nasional Pemberdayaan Mandiri atau PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Teluk Pandan.

2. Data Sekunder yaitu data olahan yang diperoleh dari data-data berupa jurnal, laporan, literature dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data sesuai dengan judul penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yakni :

1. Studi Kepustakaan (library research), yaitu menyelidiki dan mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku dan laporan-laporan yang relevan;
2. Penelitian Lapangan (field work research), yaitu pengumpulan data primer dengan turun langsung ketempat penelitian :
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan mengenai keadaan dan kondisi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
 - b. Wawancara, yaitu Tanya jawab secara langsung dengan informan.
 - c. Dokumentasi, yaitu menggunakan data-data atau dokumen pada objek penelitian guna mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data model interaktif dari buku Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2009:19).

Penyajian Data dan Pembahasan

Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran kabupaten kutai berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999. Secara Geografis Kabupaten kutai Timur terletak pada posisi 115°56'26" Bujur Timur - 118°58'19" Bujur Timur dan 1°52'39" Lintang Utara -0°02'11" Lintang Selatan. Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 Kecamatan dengan luas wilayah 35.747 Km² atau 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, berbatasan dengan kabupaten Berau disebelah utara, kabupaten kutai kartanegara di sebelah selatan dan barat, selat makasar dan laut Sulawesi di sebelah timur . Kondisi Geografis kabupaten Kutai timur terbagi menjadi 3 yaitu kawasan perkotaan, kawasan pedalaman dan kawasan pantai.

Kondisi Sosial Ekonomi

Sejak dimekarkan pada tahun 1999 Kabupaten Kutai Timur melalui gerakan daerah pembangunan agribisnis dengan "*triple track*" yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan pembangunan agribisnis dalam arti luas, terus melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten kutai timur mulai

menampakkan hasilnya dengan meningkatnya pendapatan daerah. Berdasarkan PDRB perkapita tanpa migas dan batubara, sector pertanian dan perdagangan merupakan sektor yang paling dominan pengaruhnya terhadap PDRB Kutai Timur dengan sumbangan masing-masing sebesar 29,36% dan 23,59% disusul sector bangunan dengan kontribusi sebesar 15.97%, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui mulai menampakkan hasil.

Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Program mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan /meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya dalam menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Hasil Penelitian

Pengukuran yang pertama kali dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan nasional masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, penulis mengajukan pertanyaan kepada key informant dan informan terkait dengan pengetahuan narasumber mengenai bagaimana program pemberdayaan masyarakat

Pembahasan

Proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Teluk Pandan

Proses Pelaksanaan Program Pelaksanaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan masa transisi proses harmonisasi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang meletakkan masyarakat sebagai pengambilan keputusan pelaksanaan berbagai program tersebut wilayahnya. Mulai Tahun 2009, Pelaksanaan PNPM Mandiri akan merujuk kepada rancangan mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri 2009-2015.

Perencanaan partisipatif bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara aktif dalam penggalian gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.

Kualitas perencanaan partisipatif dapat diketahui dari jumlah warga yang hadir, kualitas pendapat/gagasan/usulan, serta dokumen perencanaan yang diputuskan. Perencanaan partisipatif di desa/kelurahan dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi di masyarakat, pertemuan masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya untuk identifikasi masalah potensi dan kebutuhan, pengorganisasian masyarakat dan penyusunan rencana dan program yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama. Rencana kegiatan pembangunan tersebut dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan desa/kelurahan jangka menengah dan rencana tahunan serta rencana strategis pembangunan desa/kelurahan.

Dokumen hasil perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen musrenbang desa/kelurahan untuk diteruskan ke musrenbang ditingkat lebih lanjut. Sinergi penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penyesuaian jadwal kegiatan perencanaan partisipatif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dengan jadwal kegiatan musrenbang di masing-masing daerah.
2. Mengagendakan kegiatan musrenbang dalam musyawarah penyusunan perencanaan partisipatif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
3. Apabila dokumen perencanaan tersebut disusun setelah musrenbang desa/kelurahan maka dokumen tersebut menjadi bahan musrenbang kecamatan.

Hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan adalah keterlibatan perangkat pemerintah desa/kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa/kelurahan dalam menjaring aspirasi, permasalahan, dan potensi masyarakat secara nyata. Dokumen hasil perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan harus menyeluruh terkait dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dokumen panduan musrenbang. Hal ini dimaksud agar semua informasi dari masyarakat dapat secara tepat ditangkap pada proses pengambilan keputusan ditingkat lebih lanjut. Tugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan adalah mengawal kualitas rumusan perencanaan yang dihasilkan oleh desa/kelurahan.

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

Yang menjadi kendala yang dihadapi dalam proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan adalah apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan tersebut, mungkin dari

sarana dan prasarana,dukungan masyarakat atau kerjasama masyarakat dan juga dalam hal dana operasional.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kendala yang ditemui oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan adalah kendala dalam kerja sama antar warga dan masyarakat yang kurang mendukung adanya program tersebut,adanya pegawai yang bertindak mucil dalam penyalahgunaan dana bantuan program tersebut, selain itu juga terkadang dana bantuan tersebut lambat cairnya dan terdapat pelayanan yang kurang menyenangkan dari pihak Unit Pengelola Kegiatan terhadap warga yang membutuhkan bantuan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kurangnya kerjasama antar warga atau masyarakat dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, hal ini membuat pihak Unit Pengelola Kegiatan menjadi sulit untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang program tersebut.
2. Adanya penyalahgunaan dana oleh pegawai Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dengan memotong dana bantuan yang diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan untuk kepentingan pribadi pegawai, Hal ini dilakukan karena gaji pegawai yang kurang untuk kebutuhan mereka.
3. Tidak sesuai dengan jadwal atau Terlambatnya dana bantuan yang diberikan pihak Unit Pengelola Kegiatan kepada masyarakat yang membuat masyarakat menunggu lama pencairan dana tersebut.
4. Adanya pelayanan yang kurang baik oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam memberikan pelayanan bantuan tersebut terhadap warga atau masyarakat.

Saran

1. Dalam hal kerja sama pihak Unit Pengelola Kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dengan Masyarakat harus terjalin dengan baik,agar pihak Unit Kegiatan dapat bersosialisasi dengan warga secara baik dan dapat diterima,bahkan jika terjalin dengan baik kerja sama tersebut maka akan memudahkan pihak pengelola dalam bekerja dan dapat dimengerti dengan baik oleh masyarakat atau warga tersebut.
2. Dalam hal penyalahgunaan dana, sebaiknya pihak Unit Pengelola Kegiatan tidak seharusnya menyangkut pautkan kecilnya gaji pegawai dengan cara memotong dana bantuan tersebut terhadap warga, Hal ini sama saja tidak membantu warga yang membutuhkan melainkan menjadi beban tambahan terhadap warga yang meminjam dana bantuan tersebut, Untuk hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan lagi dalam menerapkan kebijakan, karena kasian warga atau masyarakat yang sudah tidak mampu malah

- dibebankan dengan adanya pemotongan bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi pegawai Unit pengelola Kegiatan tersebut.
3. Dalam hal pencairan dana bantuan sebaiknya pihak pengelola kegiatan harus lebih transparan lagi dan terbuka kepada masyarakat atau warga, hal apa yang membuat keterlambatan pencairan tersebut, apakah dari pihak pusat atau dari Unit Pengelola Kegiatan, Hal ini agar tidak menimbulkan pemikiran negatif masyarakat terhadap pegawai Unit pengelola Kegiatan dan juga tidak membuat warga yang membutuhkan dana bantuan tersebut tidak menunggu terlalu lama.
 4. Dalam hal memberikan pelayanan, seharusnya pihak Unit Pengelola Kegiatan harus memberikan pelayanan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, agar masyarakat atau warga merasa nyaman dan terjalin kerjasama yang baik antar pegawai Unit pengeloa Kegiatan dengan Warga atau Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2005. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah Otonomi*.
- Ala, Androboyo, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta.
- A.M.W Pranaka. 1996. *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Abidin. 2002. *Teori Kebijakan*.
- Bintoro, Tjokroamidjojo, 1997. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djoko Darmawan, 2004. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ife. 1995. *Community Development Community Alternatives-Vision, Analysis and practice*.
- Tim Pengendali (PNPM) *Pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri*, PNPM Mandiri, Jakarta 2007.
- Sugiyono, 2009. *Netode Penelitian Kualitatif*.
- Suhendra. K, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung.
- Suharto Edi. 2004. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Rafika Aditama: Jakarta
- Salim, Emil, 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Soeprino. R, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Konesius, Yogyakarta.
- Suwondo, Kutu, 1998. *Struktual Sosial dan Kemiskinan*, Yayasan Bina Dharma, Slatiga.
- Sumardjan, Selo, 1980. *Kemiskinan Struktural dan Pembangunan* Kata Pengantar dalam Alfian (at. AL).
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemiskinan dan Model-model Pemberdayaan*, GAVA Media. Jakarta.

Suharto Edi.1997.*Pembangunan,Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan.STKS, Bandung.

Suharto Edi. 2004. *Membangun masyarakat memberdayakan Rakyat*, Rafika Aditama. Jakarta.

Payne.1997. Modern Social Work Theory.

Wignjosoebroto Sutandyo. 2005. *Kemisikinan dan Kesenjangan Sosial*. AirlanggaUniversitas Press, Surabaya.

Dokumen-Dokumen :

PedomanUmum Program PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri

Undang-Undang No.14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7.

SumberInternet :

[Http://www.pnpm-mandiri.org](http://www.pnpm-mandiri.org)